

ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI BALI

Putu Yusi Pramandari

Fakultas Ekonomi Universitas Mahasaraswati Denpasar

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of PAD Income and Fund Balance to economic growth districts in the province of Bali and to find out how imbalances that occur in the district in the province of Bali in Fiscal Decentralization. The results of the data analysis showed that PAD simultaneously and Fund Balance affect economic growth in the province of Bali. Partially revenue (PAD) has a positive effect on economic growth, while the balance funds partially negatively affect economic growth during the period 2006-2012. Increased economic growth in the era of decentralization This fiscal equalization has not been able to be followed by economic growth in the district in the province of Bali. This is evidenced by the Williamson index value stands at 0,687, which means there is still inequality between GDP per capital in the province of Bali. Still there is an imbalance between districts shows that the achievement of development objectives that have not been able to prosper the people's lives.

Key Word : decentralization, growth, PAD Income, inequality

I. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang mampu dicapai daerah tersebut. Tujuan pembangunan ekonomi sesuai dengan Trilogi Pembangunan adalah menciptakan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas perekonomian. Pembangunan harus mampu menciptakan pertumbuhan yang merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pembangunan tidak hanya mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga harus diikuti oleh meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat. Inilah yang menjadi target pembangunan saat ini.

Salah satu tujuan kebijakan desentralisasi adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Khusaini, 2006). Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Kabupaten dan kota merupakan daerah ujung tombak pelaksanaan pembangunan dan

diharapkan mampu menggali potensi daerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan *local accountability* pemerintah daerah terhadap rakyatnya.

Pembangunan daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali didasari oleh paradigma pertumbuhan yang didalamnya terkandung unsur pemberdayaan dan pemerataan. Berdasarkan pada latar belakang desentralisasi fiskal yang diterapkan pada kabupaten/kota di Provinsi Bali, jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB (atas dasar harga konstan tahun 2000) tahun 2006 – 2012, tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali berkisar antara 3,85 persen sampai dengan 5,69 persen. Todaro (2000) mengatakan bahwa akumulasi merupakan komponen yang berpengaruh terhadap pertumbuhan, maka komponen tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali. Sumber – sumber dana pembangunan yang dalam desentralisasi fiskal ini terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan dapat dikatakan sebagai modal dasar dari pembangunan yang penggunaannya diatur oleh pemerintah dan tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Peran pemerintah daerah dalam kegiatan perekonomian

tercermin dalam APBD yang meliputi komponen penerimaan dan pengeluaran.

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah peningkatan PDRB yang mampu menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah. Sejalan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang mampu ditunjang oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan PDRB yang disertai pemerataan. Pertumbuhan yang seperti ini menunjukkan bahwa pertumbuhan daerah telah mampu ditunjang oleh kualitas kemampuan pembiayaan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali dan untuk mengetahui ketimpangan kabupaten/ kota di Provinsi Bali dalam Desentralisasi Fiskal.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan dalam Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan varian dari pelaksanaan desentralisasi yang ditempuh suatu negara. Desentralisasi fiskal ini dapat didefinisikan sebagai devolusi (penyerahan) tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada tingkatan pemerintahan yang ada dibawahnya, *sub-national levels of government*, seperti negara bagian, daerah, propinsi, distrik, dan kota (Lutfi, 2002 : 4). Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyaknya jenis barang dan jasa kepada penduduknya (Kuznet dalam Jhingan, 1999:183). Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang diperlukan. Todaro (2000 : 124) mengatakan bahwa ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal meliputi semua bentuk investasi yang ditanamkan baik pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Model pertumbuhan ekonomi Solow

menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi, dan kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat output perekonomian serta pertumbuhannya sepanjang waktu (Menkiw, 2003 : 174). Kenaikan tingkat tabungan yang tinggi akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, tetapi perekonomian akan mendekati kondisi mapan dimana modal dan output adalah konstan. Tingkat modal yang memaksimalkan konsumsi pada kondisi mapan disebut tingkat kaidah emas.

Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai hasil pendapatan daerah dilihat dari outputnya. Secara teori produksi, apabila penerimaan daerah berupa sumber – sumber dana pembangunan (PAD dan dana perimbangan) merupakan input pembangunan maka output dari proses tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Lembaga yang mengkoordinasikan transformasi berbagai input untuk menghasilkan output tersebut disebut persahaan (Nicholson, 2001). Berdasarkan hal tersebut, dalam proses pertumbuhan ini pemerintah adalah perusahaan yang mengelola, mengalokasikan, dan mengeluarkan kebijakan berkaitan proses tersebut. Teori produksi menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara faktor produksi dan output yang dalam penelitian ini adalah sumber – sumber dana pembangunan (PAD dan dana perimbangan) dan pertumbuhan ekonomi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Davoodi dan Zou (1998) meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap 46 negara berkembang dan sedang berkembang. Peneliti menggunakan model pertumbuhan endogen yang menunjukkan bagaimana tingkat dari desentralisasi fiskal memiliki efek pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Pada hasil penelitian ini, rata-rata negara berkembang lebih mandiri dibandingkan negara sedang berkembang serta memiliki GDP perkapita dengan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Kneller, dkk (1999) meneliti tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 22 negara anggota organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan (OECD)

periode tahun 1970 - 1995, dengan melakukan analisis *random effect model*. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerimaan pajak pendapatan dan keuntungan, pajak keamanan sosial, pajak upah tenaga kerja, dan pajak kekayaan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penerimaan pajak atas barang dan pelayanan domestik berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah yang bersifat produktif berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya, pengeluaran pemerintah yang non produktif berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi regional oleh Indrastuti Dewi (2004) membahas tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 1983 – 2002. Penelitian ini menggunakan variable PAD, sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagai variable bebasnya. Dengan menggunakan model regresi dalam bentuk *double log* diperoleh hasil bahwa PAD, sumbangan dan bantuan pemerintah pusat, serta penanaman modal asing memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, sedangkan variable penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat.

Sri Wahyuni (2007) meneliti tentang “Pengaruh Sumber – Sumber Dana Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Dalam Era Desentralisasi Fiskal.” Hasil penelitiannya menyatakan bahwa sumber – sumber dana pembangunan yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali baik secara simultan maupun parsial.

2.3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada teori dan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini dapat jelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana

perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali.

- 2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam era desentralisasi fiskal diikuti oleh pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.

III. METODE PENELITIAN DAN TEKNIK ANALISIS DATA

Objek dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2000 menurut 9 (sembilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali selama Tahun 2006-2012. Laju pertumbuhan ekonomi adalah variabel terikat (Y) sedangkan PAD (X1) dan Dana Perimbangan (X2) adalah variabel bebas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Biro Keuangan Provinsi Bali, dan dinas lain yang terkait. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam adalah dengan menggunakan metode observasi non perilaku. Metode observasi non perilaku adalah metode pengumpulan data yang diambil dari dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, menyalin dan mengolah dokumen dan catatan tertulis yang ada.

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah regresi linier berganda dengan data panel (*pooling data*) 9 (sembilan) kabupaten/ kota di Provinsi Bali periode tahun 2003 – 2009. Untuk mengetahui model panel yang digunakan, terlebih dahulu digunakan Uji *Restricted F-test* serta Uji *Random* dan *Fixed Effect*. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2006 – 2012. Persamaan regresinya sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Ln } X_1 + \beta_2 \text{Ln } X_2 + \mu_i$$

Keterangan :

Y = Laju pertumbuhan ekonomi 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2006 – 2012

- $\ln X_1$ = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2006 – 2012
- $\ln X_2$ = Dana perimbangan 9 (sembilan) kabupaten/kota di Provinsi Bali periode tahun 2006 – 2012
- α = Intersep yang menggambarkan rata-rata pengaruh dari berbagai variabel/faktor yang mempengaruhi Y akan tetapi tidak dimasukan dalam persamaan regresi.
- β_1 - β_2 = Koefisien regresi parsial.
- μ_i = Tingkat kesalahan (gangguan) stokastik.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Restricted F-test, Uji Random, dan Fix Effect

Untuk mengetahui model *Pooled Least Square* (PLS) atau *Fixed Effect Model* (FEM) yang akan dipilih untuk estimasi data dapat dilakukan dengan uji F-test. PLS adalah *restricted model* dimana ia menerapkan *intercept* yang sama untuk seluruh individu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa $F_{hitung} = 6,58195 > F_{(0,05)(4)(51)} = 2,53$. Ini berarti bahwa model yang diolah dengan *Fixed Effect* (*Unrestricted*) lebih baik dibandingkan dengan model yang diolah dengan Model *Pooled Least Square* (*Restricted*).

Setelah diketahui bahwa *unrestricted model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan *restricted model*, maka selanjutnya untuk melihat apakah *unrestricted model* mengikuti *random effect* atau *fixed effect* dengan Hausman test (Sanjoyo, 2007). Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 6.0 diperoleh bahwa $p\text{-value} = 0,0000 < \alpha = 0,05$. Ini berarti model *Fixed effect* lebih baik digunakan untuk melakukan analisis data panel dibandingkan dengan model *Random effect*.

4.2. Uji Simultan dan Parsial

Penelitian menggunakan program Eviews 6.0. Hasil pengolahan data dengan model *Fixed Effect* menghasilkan persamaan sebagai berikut.

$$Y = 8,185 + 0,201 \ln X_1 - 0,427 \ln X_2$$

Pengujian secara simultan atau menyeluruh bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang linier antara variabel terikat yaitu laju pertumbuhan ekonomi (Y) dengan variabel bebas yaitu PAD (X_1) dan dana perimbangan (X_2). Hasil uji serempak diperoleh nilai $F_{hitung} (7,792) > F_{table} (2,76)$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa PAD dan dana perimbangan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam era desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, khususnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni yang juga menyimpulkan bahwa sumber – sumber dana pembangunan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali.

Uji parsial untuk melihat pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil bahwa $t_{hitung} (4,558) > t_{table} (1,671)$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali dalam era desentralisasi fiskal. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni (2008) yang menyimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah (yang merupakan komponen utama PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Semakin besar PAD yang mampu dihasilkan oleh kabupaten/ kota maka semakin besar sumber pendanaan pembelanjaan daerah yang dimiliki. Meningkatnya PAD berarti meningkatnya modal pembangunan dan sekaligus membuktikan semakin tingginya tingkat kemandirian daerah dalam menggali potensi daerah demi mencapai peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi utama dalam PAD.

Sedangkan hasil analisis pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} (-1,929) > t_{table} (1,671)$ maka H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif

terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Sri Wahyuni (2008) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Adanya hubungan yang negatif antara dana perimbangan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota ini menunjukkan bahwa seiring dengan era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal saat ini, meningkatnya kemampuan daerah dalam menghimpun dana pembangunan melalui dana perimbangan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Hal ini dikarenakan alokasi dana perimbangan tidak sepenuhnya terfokus pada peningkatan produktifitas laju pertumbuhan ekonomi. Dana anggaran untuk pembangunan seharusnya diprioritaskan untuk hal – hal yang bersifat produktif seperti pemberian intensif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sektor pertanian atau agribisnis yang mampu memberikan devisa bagi daerah, sektor industri dan perdagangan serta sektor ekonomi lainnya yang sesuai dengan potensi daerahnya.

4.3. Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali dalam Era Desentralisasi Fiskal

Disparitas atau ketimpangan regional dapat dilihat melalui indikator PDRB per kapita. Alasan utamanya karena PDRB per kapita merupakan indikator kesejahteraan suatu masyarakat. Terjadinya disparitas selalu mengikuti arah pembangunan, apabila dikaitkan dengan hipotesis Kuznets dimana saat titik awal pembangunan disparitas akan semakin tinggi hingga pada kurun waktu tertentu akan mengalami penurunan yang menyerupai titik U terbalik (Tumbunan, 2001). Ilustrasi tersebut menyiratkan bahwa jika pertumbuhan ekonomi tinggi akan menyebabkan terjadinya gejala disparitas pendapatan antar daerah. Fenomena tersebut terjadi karena daerah kaya akan terus mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan daerah miskin akan mengalami keterbelakangan.

Efek individu yang dihasilkan oleh model *fixed effect* merupakan gambaran dari heterogenitas setiap daerah. Heterogenitas antar daerah yang dihasilkan mencerminkan adanya faktor-faktor/variabel lain yang dimiliki satu daerah tetapi tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah yang memiliki keunggulan dalam variabel lain (diluar variabel bebas dalam model). Apabila diasumsikan variabel bebas tidak berubah, maka determinan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah hanya akan tergantung dari efek individu (heterogenitas antar daerah).

Tabel 1
Efek Individu dengan Model Fixed Effect White Heteroscedasticity Consistence Variance

No.	Kabupaten/ Kota	Nilai Intersep per Kabupaten/ Kota
1	Buleleng	7,324035
2	Jembrana	7,482926
3	Tabanan	7,418816
4	Badung	7,677474
5	Gianyar	8,279243
6	Bangli	8,653260
7	Klungkung	8,724212
8	Karangasem	8,824991
9	Denpasar	9,282373

Sumber : Hasil Perhitungan

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Kota Denpasar mempunyai nilai intersep yang paling tinggi, relatif terhadap daerah lain (Tabel 1). Artinya adalah bahwa heterogenitas antara Kota Denpasar dengan daerah-daerah lain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain. Salah satu variabel yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar relatif lebih baik (*ceteris paribus*, variabel bebas = 0)

dibandingkan dengan daerah lain adalah tenaga kerja yang mempunyai latar belakang pendidikan yang lebih modern dan mempunyai pengalaman dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang pekerjaannya, sehingga mampu meningkatkan kualitas kemampuan tenaga kerja. Menurut Wicken (*undated*), kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi tidak akan sebesar kontribusi perbaikan kualitas tenaga kerja. Pengembangan dalam kualitas angkatan kerja dapat diciptakan melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan mungkin lebih penting adalah melalui pelatihan-pelatihan pekerjaan. Intensitas pekerjaan yang dapat dilakukan per jam oleh tenaga kerja menjadi kurang penting dibandingkan dengan peningkatan kualitas tenaga kerja. Analisis ini sangat kuat mendukung pendapat umum tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan modern saat ini. Hal yang tidak kalah penting adalah adanya kesinambungan dalam proses pendidikan dan *training* untuk peningkatan kualitas tenaga kerja (Farid, 2007).

Ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur antar kabupaten/kota di Provinsi Bali juga merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perbendaan dalam pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah. Kota Denpasar yang merupakan ibukota dari Provinsi Bali tentunya memiliki infrastruktur yang lebih banyak dan jauh lebih memadai dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Selain pentingnya ketersediaan infrastruktur fisik, ketersediaan *soft infrastructure* juga sama pentingnya. Era otonomi seperti sekarang ini, menyebabkan setiap daerah mempunyai otonomi pada bidang-bidang tertentu, sehingga dimungkinkan kebijakan pemerintah daerah akan berbeda. Padahal dalam kaitannya dengan investasi, kepastian hukum merupakan pertimbangan utama bagi para investor. Hal inilah yang menyebabkan juga terjadinya disparitas perekonomian di daerah saat ini (Farid, 2007: 67).

Pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan dari Trilogi Pembangunan. Adanya pembangunan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga diikuti dengan tingkat pemerataan merupakan

suatu cermin kesejahteraan masyarakat. Berikut ini disajikan mengenai nilai indeks Williamson per kabupaten/kota di Provinsi Bali selama era desentralisasi fiskal.

Tabel 2
Nilai Indeks Williamso Antar
Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali
Tahun 2006 – 2012

Tahun	IW
2006	0.463
200 7	0.457
2008	0.532
2009	0.574
2010	0.553
2011	0.585
2012	0.687

Sumber : Hasil olah data

Tabel 2 Nilai Indeks Williamso Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali Tahun 2006 – 2012. Tabel 2 menunjukkan bahwa sampai tahun 2012 nilai indeks Williamson atau ketimpangan pendapatan antar kabupaten kota di Provinsi Bali adalah sebesar 0,687. Nilai dari koefisien Williamson ini adalah terletak antara 0 sampai dengan 1, dimana semakin mendekati 0 berarti disparitas pendapatan semakin ringan, dan semakin mendekati 1 disparitas pendapatan adalah semakin berat. Dari kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa disparitas pendapatan dengan menggunakan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali relatif stabil pada periode desentralisasi fiskal ini. Walaupun demikian keadaan tersebut belum menunjukkan adanya pemerataan pembangunan antar kabupaten/ kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal belum mampu menciptakan pemerataan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Bali. Beberapa faktor yang mungkin menjadi alasan ketimpangan ini diantaranya perbedaan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki oleh kabupaten/kota serta perbedaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memicu kualitas SDM

yang mampu meningkatkan pembangunan kabupaten/kota serta infrastruktur yang tersedia.

SDA yang dimiliki oleh Provinsi Bali memang tidak semelimpah provinsi lain seperti Aceh dengan gas alamnya ataupun Irian Jaya dengan tembaganya. Provinsi Bali bergantung pada SDA yang mendukung sektor wisata yang menjadi sumber PAD tertinggi provinsi ini. Akan tetapi tidak semua kabupaten/ kota memiliki sumber SDA yang sama yang mampu menarik minat wisatawan ataupun investor untuk berinvestasi. Hal ini yang menyebabkan hanya Kabupaten Badung yang memiliki PAD tertinggi setelah desentralisasi yang kemudian diikuti oleh Kota Denpasar.

Kota Denpasar sebagai pusat pemeritahan menjadi lahan pekerjaan utama yang dilirik oleh penduduk Bali. Hal ini yang menjadikan pembangunan di Kota Denpasar lebih pesat dibandingkan kabupaten lainnya. Keadaannya sama seperti ibukota Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan provinsi, Kota Denpasar menarik para pencari kerja dan menjadikannya sebagai sumber SDM berkualitas. Faktor – faktor inilah yang seharusnya menjadi pusat perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan daerahnya, sehingga tujuan dari otonomi dan desentralisasi fiskal mampu menjadikan daerah lebih mandiri yang berarti daerah diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonominya secara merata. Bagaimana setiap kabupaten/ kota mampu memanfaatkan SDA maupun SDM yang dimilikinya sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Perbaikan pendapatan daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita yang berarti peningkatan daya beli masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Dengan tercapainya kesejahteraan ini barulah dapat dikatakan tercapainya tujuan dari pembangunan nasional.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan secara serempak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali, sedangkan dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/ kota di Provinsi Bali.
- 2) Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dalam era desentralisasi fiskal belum mampu diikuti oleh pemerataan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini terbukti dengan nilai indeks Williamson yang berada pada angka 0,687, yang berarti masih adanya ketimpangan PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Bali.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/ kota di Provinsi Bali sekiranya dapat mempertimbangkan secara mendalam peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan laju pertumbuhan penduduk sebagai modal pembangunan dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui reorientasi penggunaan sumber pendanaan pembangunan dan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.
- 2) Upaya – upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber dana pembangunan harus semakin ditingkatkan demi tercapainya kemandirian daerah sesuai dengan tujuan desentralisasi. Peningkatan penerimaan daerah khususnya yang persumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Dana perimbangan sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah hendaknya dapat dialokasikan untuk membantu pendanaan daerah.

- Reorientasi dana perimbangan diperlukan dalam melaksanakan fungsinya menyediakan pelayanan publik yang nantinya diharapkan dapat menjadi intensif daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 4) Pertumbuhan yang tinggi di Provinsi Bali harus mampu menciptakan pemerataan pertumbuhan bagi kabupaten/ kota, untuk itu pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan upaya perbesaran anggaran pembangunan serta memberikan prioritas kebutuhan bagi daerah dengan PDRB rendah.
 - 5) Pengembangan investasi fisik hendaknya diarahkan pada kabupaten dengan infrastruktur yang lebih rendah, sehingga investasi tidak hanya terpusat pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, selain itu alokasi investasi harus dilihat berdasarkan potensi daerah yang belum diupayakan sehingga mampu memberikan nilai tambah yang baru terhadap pembentukan PDRB daerah yang berujung pada peningkatan PDRB per kapita.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 20013. *Bali Membangun 2006-2012*.
- Bendesa, IKG. 2007. *Hand Out Mata Kuliah Ekonometrika Program Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*. Denpasar.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
- _____. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Farid, Miftah. 2007. *Pengaruh Disparitas Antar Daerah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Menggunakan Data Panel Propinsi*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Gujarati, Damodar. (Sumarno Zain; penterjemah). 1997. *Ekonometrika Dasar Cetakan Pertama*, Jakarta : Erlangga.
- Davoodi, Hamid dan Henmg-Fu Zou. 2000. *Fiscal Decentralization And Economic Growth: A Cross-Country Study*. Journal Of Urban Economics 43, 244]257_1998. Article No. Ue972042.
- Indrawati, Yulia. 2007. *Panel Data Regression Model*. Jakarta.
- Jhingan, M.L., 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kneller, Richard, Michael F. Blaney and Norman Gemmel. 1999. "Fiscal Policy and Growth : Evidence from OECD Countries", *Journal of Public Economics*, Volume 74 : 171-190.
- Kuncoro, M. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP-AMP-YKPN.
- Lutfi, Achmad. 2002. Pemanfaatan Kebijakan Desentralisasi Fiskal Berdasarkan UU No. 34/2000 oleh Pemda Untuk Menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah : Suatu Studi Di Kota Bogor.
- Menkiew, N.Gregory. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Edisi Kelima. Jakarta : Erlangga.
- Nachrowi, D Nachrowi dan Hardius Usman. 2006. *Pendekatan Populer dan Praktis: Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nicholson, Water. 2001. *Teori Ekonomi Mikro, Prinsip Dasar dan Pengembangannya*. Jakarta : PT Raja Grafindo.

Republik Indonesia. 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

_____. 2004. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan daerah

Sri Wahyuni, Ni Ketut. 2008. Pengaruh Sumber – Sumber Dana Pembangunan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Dalam Era Desentralisasi Fiskal. Tesis Program Magister Ekonomi Pembangunan pada Program Pasca Sarjana FE UNUD, Denpasar.